

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya (Sukirno, 2010).

Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Indikator ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional dari waktu ke waktu dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal serta moneter, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Perekonomian dikatakan tumbuh apabila terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, yang secara langsung berdampak pada tambahan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu (Masdi *et al.*, 2023; Maulana *et al.*, 2022).

Menurut Adam Smith (1776), dalam (Suryani, 2016) pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja yang didorong oleh

spesialisasi dan akumulasi modal. Spesialisasi ini terjadi melalui pembagian kerja (*division of labour*) yang membuat tenaga kerja menjadi lebih terampil, efisien, dan produktif. Akumulasi modal diperlukan untuk memperluas produksi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Namun, tidak semua pertumbuhan mencerminkan pembangunan yang merata. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan yang ideal tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pandangan ini dikuatkan oleh (Pitri *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, investasi, dan tingkat pengangguran.

Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan elemen krusial dalam menilai kemajuan suatu negara, pemahamannya harus dilengkapi dengan analisis atas kualitas pembangunan dan distribusi hasil pertumbuhan secara adil. (Yogatama *et al.*, 2022).

Bukan hanya itu, negara yang sanggup menopang bahkan menumbuhkan perekonomiannya merupakan hasil yang menjamin perlunya perencanaan dan kewaspadaan dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya. Namun, belum tentu semua negara dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya meskipun di dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkannya kerjasama ekonomi global untuk membantu kebutuhan bersama

dan khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi para pemangku kepentingan dibenarkan (Sari *et al.*, 2017).

Dalam penelitian Putri dan Ichsan (2023) perekonomian diartikan sebagai jumlah barang dan jasa meningkat apabila mengalami pertumbuhan ekonomi. Mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai produk domestik bruto (PDB) yang digunakan PDB berdasarkan harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan fokus utama pembangunan nasional karena perannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah dan jumlah penduduk besar, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi (BPS Indonesia, 2024).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan fundamental yang saling berkaitan, yaitu rendahnya kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari ketimpangan IPM antarwilayah, tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) terutama di kalangan terdidik, serta ketidakstabilan inflasi pangan yang memengaruhi daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Menurut Bappenas (2023), ketimpangan IPM menunjukkan belum meratanya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Suryahadi, Akhmadi, dan Suryadarma (2009), yang menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia menjadi faktor utama penghambat pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa TPT di kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi masih lebih tinggi dibandingkan

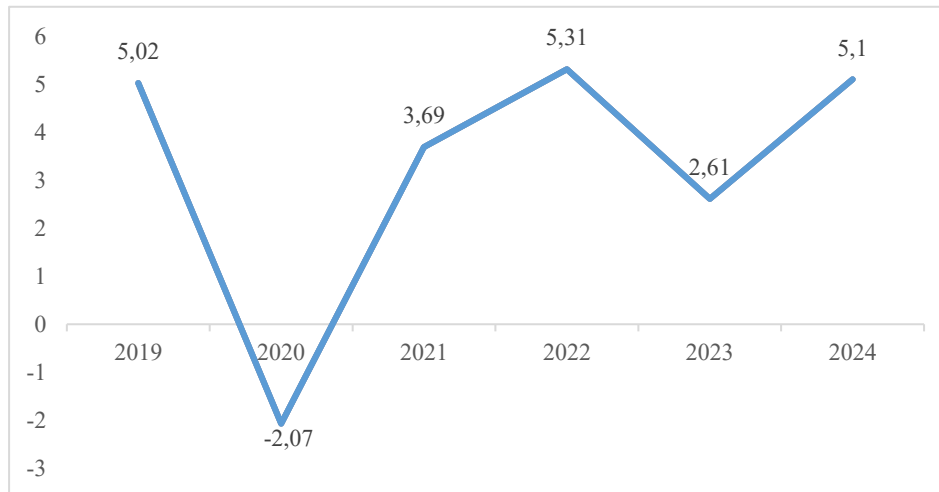
lulusan dengan pendidikan rendah, yang menandakan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Di sisi lain, laporan Bank Indonesia (2023) menyebutkan bahwa fluktuasi harga pangan pokok seperti beras dan minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi, yang paling berdampak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini sejalan dengan analisis oleh Sulistyowati dan Dhewanto (2021), yang menyatakan bahwa inflasi pangan secara langsung menurunkan konsumsi rumah tangga miskin dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OECD (2022) menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta penguatan sistem pelatihan vokasi yang relevan dengan pasar kerja. Selain itu, World Bank (2023) menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan melalui perbaikan rantai distribusi dan penguatan cadangan pasokan, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun indikator makroekonomi Indonesia terlihat membaik, tantangan dari aspek kualitas pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga masih menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh World Bank (2023) dan didukung oleh temuan empiris dari Asri dan Hermawan (2022), diperlukan strategi kebijakan yang terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelatihan kerja adaptif, serta pengendalian inflasi pangan secara efektif, agar manfaat

pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara nyata dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut gambar yang menggambarkan perkembangan pertumbuhan



ekonomi
Indonesia
2019-
2024:
Gambar 1.1
Pertumbuhan

n Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: World Bank Data, 2025

Gambar 1.1 diatas menunjukkan pola fluktuatif pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2019 hingga 2024. Setelah mengalami kondisi stabil pada awal periode, perekonomian sempat terpuruk akibat tekanan pandemi yang menyebabkan kontraksi signifikan. Namun, secara bertahap ekonomi mulai menunjukkan pemulihan seiring pelonggaran kebijakan dan membaiknya aktivitas domestik. Pemulihan ini terus berlanjut hingga mencapai titik tertinggi pasca-pandemi, meskipun sempat melambat kembali karena tekanan global. Di akhir periode, pertumbuhan kembali menguat, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang mulai stabil dan adaptif terhadap berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari lingkungan eksternal (BPS Indonesia, 2025).

Pada awal tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02%. Ini menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil sebelum pandemi, di mana konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor masih berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi besar hingga -2,07% karena pandemi. Saat itu, aktivitas masyarakat sangat terbatas, banyak sektor usaha terhenti, dan rantai pasok global terganggu, sehingga ekonomi nasional pun menurun tajam (BPS Indonesia, 2025).

Dan pada tahun 2021 menjadi awal pemulihan. Ekonomi tumbuh sebesar 3,69% seiring dengan mulai longgarnya pembatasan sosial, meningkatnya aktivitas bisnis, dan pelaksanaan program vaksinasi. Masyarakat mulai kembali berbelanja, dan investasi pun perlahan meningkat (BPS Indonesia, 2025).

Pemulihan semakin kuat pada tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, yang menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Ekspor Indonesia naik karena permintaan global meningkat, terutama untuk komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Selain itu, aktivitas masyarakat yang sudah normal kembali mendorong belanja rumah tangga (BPS Indonesia, 2025).

Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,61%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa tantangan baru, seperti ketidakpastian ekonomi global, kenaikan suku bunga, inflasi akibat naiknya harga energi dan pangan, serta berkurangnya daya beli masyarakat. Penurunan ini juga bisa menjadi tanda bahwa ekonomi sedang beradaptasi menuju kondisi yang lebih stabil setelah masa pemulihan cepat pascapandemi (BPS Indonesia, 2025).

Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menunjukkan penguatan dengan mencatat angka sebesar 5,10%. Kinerja positif ini didorong oleh stabilitas konsumsi domestik, pemulihan sektor pariwisata, dan keberlanjutan proyek infrastruktur strategis. Meskipun tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan tekanan harga komoditas masih ada, pemerintah berhasil menjaga kepercayaan investor dan mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai stimulus fiskal dan reformasi struktural (BPS Indonesia, 2025).

Fenomena yang terlihat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 sampe 2024 yang mengalami fluktuasi cukup tajam. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami kontraksi, ekonomi Indonesia mampu bangkit secara bertahap dan menunjukkan tren positif menuju stabilitas (BPS Indonesia, 2025).

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya secara menyeluruh. IPM tidak hanya mengukur pencapaian ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi non-ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan. Terdapat tiga dimensi utama dalam IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS Indonesia, 2023).

Teori tentang IPM menjelaskan bahwa jika suatu negara berinvestasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, maka hasil utamanya adalah terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Artinya, masyarakat akan menjadi lebih terdidik, sehat, dan mampu bekerja secara produktif. Pendidikan membuat orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, sedangkan kesehatan memungkinkan mereka bekerja secara optimal tanpa sering terganggu oleh penyakit. Orang-orang yang sehat dan berpendidikan juga cenderung lebih inovatif dan mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, seperti perkembangan digital saat ini (Todaro & Smith, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Barro dan Lee (2023) mendukung pandangan ini. Mereka menemukan bahwa negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang tinggi, umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini karena modal manusia yang berkualitas mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi

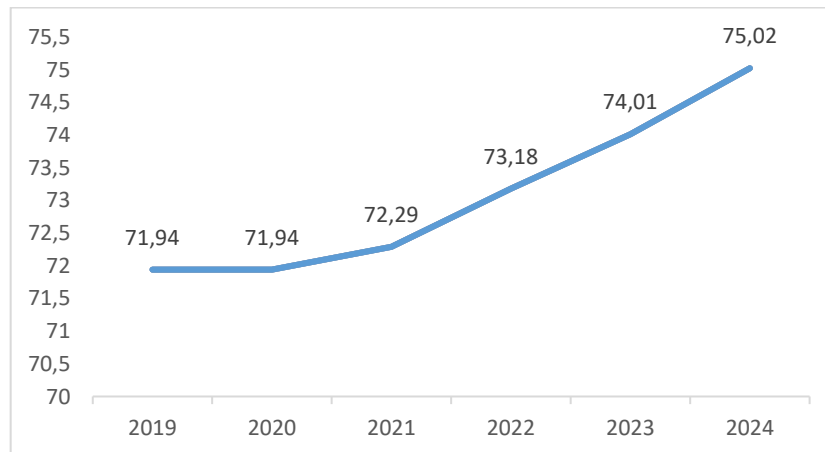
Dan penelitian yang dilakukan oleh (Syahril *et al.*, 2022) peningkatan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia. Dan Ramirez (2013) dalam *The Journal of Developing Areas*, menunjukkan adanya hubungan dua arah antara IPM dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Muda *et al.*, 2019) di Sulawesi Utara di tahun 2003–2017 ini dikatakan bahwa tiga komponen utama IPM angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita semuanya

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dan oleh (Sari *et al.*, 2021) yang menggunakan panel data analisis nasional menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan (meski terkadang negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi bersama variabel pengangguran dan pendapatan per kapita.

Dan (Harimurti, 2022) melakukan penelitian di tahun 2010–2020 menggunakan studi panel regression nasional menunjukkan bahwa IPM (HDI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, bersama dengan variabel dana desa dan penurunan kemiskinan. Dan sebaliknya menurut (Muqorrobin *et al.*, 2017), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, peningkatan IPM dianggap sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini karena masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan memiliki daya beli yang cukup akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi serta dapat berkontribusi secara signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, IPM sering dijadikan tolak ukur dalam perumusan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah (UNDP, 2020). Berikut adalah gambar indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2019-2024:



Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1.2 diatas menunjukkan tren yang cenderung stabil meningkat sepanjang periode 2019–2024 tanpa adanya fluktuasi. Pada awal periode, tepatnya tahun 2019 hingga 2020, kondisi terlihat tetap dan belum menunjukkan perubahan. Namun mulai tahun berikutnya, tren mulai menunjukkan kenaikan yang terjadi secara bertahap dan konsisten setiap tahun. Tidak terdapat penurunan atau lonjakan tajam, sehingga pola yang terbentuk mencerminkan perkembangan positif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2019 hingga 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami stagnasi di angka 71,94. Tidak adanya kenaikan selama dua tahun ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu faktor utama stagnasi ini adalah merebaknya pandemi COVID-19, yang memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan perekonomian nasional (BPS Indonesia, 2025).

Memasuki tahun 2021, IPM mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan meningkat menjadi 72,29, seiring dengan kembalinya aktivitas layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan kenaikan IPM menjadi 73,18 yang menandakan mulai efektifnya berbagai program pemerintah dalam memperbaiki layanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pada tahun 2023, IPM meningkat lagi menjadi 74,01, menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjaga momentum perbaikan meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan krisis energi serta pangan. Terbaru, pada tahun 2024, IPM Indonesia mencapai 75,02, yang merupakan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan arah pembangunan manusia yang semakin positif dan berkelanjutan (BPS Indonesia, 2025).

Secara keseluruhan grafik diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2019–2024, mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Tidak terdapat fluktuasi atau penurunan selama periode tersebut, melainkan terjadi peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif yang mencerminkan perbaikan kondisi secara terus-menerus dalam rentang waktu lima tahun tersebut (BPS Indonesia, 2025).

Selain IPM, TPT juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan, namun sementara tidak

bekerja, serta pengangguran. Pengangguran terbuka meliputi orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Kartasaita, 2019).

Secara teori, pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan SDM dalam kegiatan produksi. Menurut Mankiw (2021), ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak tenaga kerja yang tidak terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, sehingga kapasitas produksi nasional tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi tidak tercapai secara penuh, yang pada akhirnya menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga dan konsumsi masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam permintaan agregat. Rendahnya konsumsi masyarakat akan menghambat investasi dan ekspansi dunia usaha, yang secara tidak langsung turut memperlambat pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

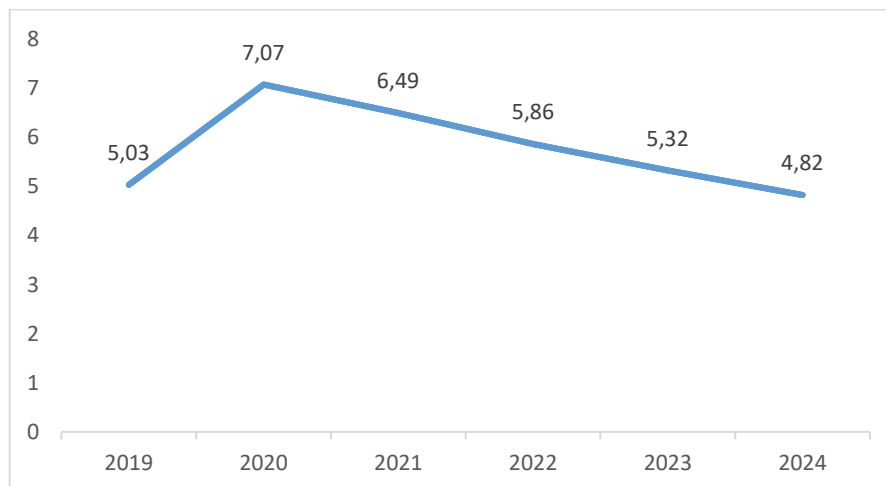
Lebih lanjut, pengangguran juga dapat menimbulkan dampak sosial jangka panjang seperti meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas, yang semuanya turut membebani pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Bank Dunia (2023) menekankan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pengangguran tinggi cenderung mengalami stagnasi ekonomi karena tidak mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan inklusif. Oleh sebab itu, pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja

menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut teori Keynesian (1936), pengangguran terjadi akibat kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika konsumsi dan investasi menurun, permintaan terhadap barang dan jasa ikut melemah, sehingga perusahaan mengurangi produksi dan menekan permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat. Pemikiran ini ditegaskan dalam berbagai studi, seperti yang dijelaskan oleh Vari (2011) di mana dijelaskan bahwa pengangguran timbul karena permintaan efektif yang tidak mencukupi. Hal serupa juga disampaikan oleh Kawai (2013) yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pasar tenaga kerja disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong permintaan dan menurunkan tingkat pengangguran.

Menurut Suroto menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka menunjuk kepada persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Sebaliknya partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan. Jadi, tingkat pengangguran terbuka menunjuk kepada penduduk bekerja atau memiliki pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, serta pengangguran (Martaliah, 2021). tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki beberapa faktor yaitu: jumlah penduduk yang masih bersekolah, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, tingkat penghasilan keluarga, tingkat upah, struktur umur, tingkat pendidikan, kegiatan perekonomian (Miftahuddin, 2020).

Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi *et al.*, 2021) TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang berarti semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan oleh ILO (2020) juga menyatakan bahwa penurunan pengangguran terbuka, terutama di kalangan usia muda, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Berikut adalah gambar tingkat pengangguran terbuka Indonesia tahun 2019-2024:



Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1.3 di atas menunjukkan adanya perubahan yang fluktuatif namun cenderung menurun dalam periode enam tahun dari 2019 hingga 2024. Awalnya, terjadi peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai titik puncak, namun setelah itu terlihat penurunan yang berlangsung secara bertahap dari tahun ke tahun. Pola ini mencerminkan bahwa meskipun sempat mengalami lonjakan yang

signifikan, variabel yang diamati tidak mampu mempertahankan tren positif tersebut dan justru mengalami penurunan secara berkelanjutan hingga akhir periode. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan atau kondisi tertentu yang menyebabkan kinerja variabel terus menurun setelah sempat membaik di awal periode pengamatan (BPS Indonesia, 2025).

Pada awal periode yaitu tahun 2019, tingkat pengangguran berada di angka 5,03%. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dengan aktivitas usaha yang berjalan normal dan peluang kerja yang cukup tersedia, karena saat itu belum terjadi gangguan besar seperti pandemi (BPS Indonesia, 2025).

Namun, pada tahun 2020, tingkat pengangguran melonjak drastis menjadi 7,07%. Kenaikan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memaksa banyak usaha untuk menghentikan operasional atau mengurangi jumlah pekerja, terutama di sektor pariwisata, manufaktur, dan UMKM. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan baru (BPS Indonesia, 2025).

Memasuki tahun 2021, kondisi mulai membaik dengan turunnya angka pengangguran menjadi 6,49%. Ini menandakan bahwa ekonomi mulai pulih, ditandai dengan pelonggaran pembatasan sosial, dibukanya kembali sektor usaha, dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, ketika tingkat pengangguran menurun lagi menjadi 5,86% seiring meningkatnya penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya, pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap kewirausahaan (BPS Indonesia,

2025). Tahun 2023 mencatat penurunan lanjutan menjadi 5,32%, menunjukkan bahwa pasar kerja semakin membaik, didukung oleh pertumbuhan di sektor informal, jasa, dan industri. Terbaru, pada tahun 2024, tingkat pengangguran turun ke angka terendah dalam enam tahun terakhir, yakni sebesar 4,82%. Penurunan ini mencerminkan semakin kuatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya serapan tenaga kerja di berbagai sektor (BPS Indonesia, 2025).

Secara keseluruhan, tren dari 2019 hingga 2024 menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang konsisten. Meskipun pemulihan tidak berlangsung secara instan, arah perbaikannya jelas, menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam menekan pengangguran mulai menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini penting karena tingginya pengangguran tidak hanya berdampak pada pendapatan masyarakat, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (BPS Indonesia, 2025).

Dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2014).

Berdasarkan teori yang ada tentang inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi bahwa rendah dan terkendalinya inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan adanya peningkatan permintaan dan aktivitas ekonomi yang sehat (Mankiw, 2021). Namun, jika inflasi meningkat terlalu tinggi, dampaknya dapat merugikan, terutama karena menurunkan daya beli masyarakat,

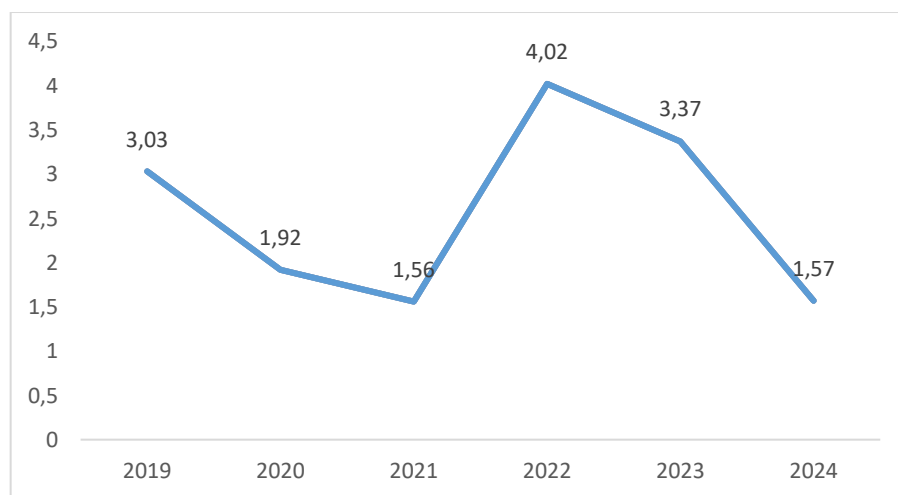
meningkatkan biaya hidup, dan menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Ketika harga-harga barang naik secara signifikan, konsumsi rumah tangga cenderung menurun dan investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya, sehingga aktivitas ekonomi bisa melambat (Samuelson & Nordhaus, 2019).

Menurut laporan Bank Indonesia (2023), menjaga stabilitas harga menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat efektivitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.

Teori mengenai inflasi juga dikemukakan oleh Milton Friedman, tokoh utama aliran monetaris. Dalam pandangannya, inflasi adalah fenomena moneter, yang berarti penyebab utama inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak seimbang dengan pertumbuhan output riil suatu negara. Friedman secara tegas menyatakan bahwa *“inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”*, yang artinya inflasi tidak akan terjadi jika jumlah uang yang beredar dikendalikan dengan baik. Dengan kata lain, apabila bank sentral mencetak uang melebihi kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian, maka nilai uang akan turun dan harga-harga akan naik Friedman, (1963). Pandangan ini diperkuat oleh temuan dalam penelitian oleh Nawaz, Iqbal, dan Anwar (2012), yang menyatakan bahwa pertumbuhan uang beredar memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap tingkat inflasi, terutama di negara

berkembang. Demikian pula, studi empiris oleh Choudhri dan Malik (2012) menunjukkan bahwa kendali moneter yang ketat mampu menekan tekanan inflasi dalam jangka panjang, sejalan dengan pandangan monetaris klasik.

Menurut penelitian Tambunan *et al.*, (2021) inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. Dan menurut Pitri *et al.*, (2024), pengaruh tingkat inflasi, investasi dan pengangguran di asia tenggara, menggunakan model ARDL untuk periode 1996–2021, menunjukkan bahwa inflasi berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam jangka pendek maupun panjang. Demikian pula, oleh Barro (1995) menunjukkan bahwa di negara berkembang, inflasi yang tinggi secara konsisten menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi riil. Berikut gambar inflasi Indonesia tahun 2019-2024:



Gambar 1.4 Inflasi Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: World Bank Data, 2025

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa inflasi Indonesia selama 2019 hingga 2024 bergerak fluktuatif tanpa tren yang konsisten. Inflasi awalnya cukup tinggi, kemudian turun signifikan hingga mencapai titik terendah pada 2021. Lonjakan tajam terjadi pada 2022 akibat tekanan harga yang kuat, namun kembali mereda dalam dua tahun berikutnya. Pola ini mencerminkan ketidakstabilan inflasi yang dipengaruhi oleh pemulihan pascapandemi, gangguan rantai pasok global, serta respons kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan harga (BPS Indonesia, 2025).

Pergerakan inflasi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi domestik maupun global. Pada tahun 2019, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,03%, berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Ini menunjukkan kestabilan ekonomi nasional dengan permintaan masyarakat dan harga kebutuhan pokok yang relatif terkendali (BPS Indonesia, 2025).

Namun, memasuki tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda, inflasi turun drastis menjadi 1,92%. Tren ini berlanjut pada 2021 dengan inflasi sebesar 1,56%. Penurunan tersebut mencerminkan melemahnya aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat yang menurun, dan terhambatnya kegiatan usaha akibat pembatasan sosial. Akibatnya, tekanan terhadap harga barang dan jasa pun menurun secara signifikan (BPS Indonesia, 2025).

Situasi berubah pada tahun 2022, saat inflasi melonjak tajam menjadi 4,02%. Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain gejolak harga energi dan pangan global akibat perang Rusia–Ukraina, meningkatnya permintaan

pascapandemi, serta penyesuaian harga BBM dan tarif layanan publik oleh pemerintah. Lonjakan inflasi ini memberikan tekanan besar terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (BPS Indonesia, 2025).

Pada 2023, inflasi menurun menjadi 3,37% berkat upaya pengendalian harga oleh Bank Indonesia melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi pasokan barang, terutama pangan dan energi. Meskipun inflasi mulai mereda, pemerintah tetap perlu waspada terhadap fluktuasi harga global yang bisa memengaruhi stabilitas domestik.

Pada 2024, inflasi kembali turun signifikan ke level 1,57%, yang merupakan capaian terendah sejak 2021. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi baik dari sisi moneter maupun fiskal. Capaian ini juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam jalur pemulihan yang lebih kuat dan stabil setelah masa krisis akibat pandemi dan tekanan global (BPS Indonesia, 2025).

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan kebijakan domestik. Inflasi rendah pada masa pandemi mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi, sedangkan lonjakan inflasi pada masa pemulihan menandakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang perlu direspons secara hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional (BPS Indonesia, 2025).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang pengaruh IPM, TPT, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, masih ada beberapa kekurangan yang perlu

diperhatikan. Penelitian sebelumnya, seperti Syahril & Putra (2022), hanya melihat IPM secara umum di tingkat provinsi, tanpa membahas pengaruh masing-masing komponennya seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Untuk TPT, studi seperti Pratiwi & Wijaya (2021) belum banyak membahas peran pengangguran usia muda atau pengangguran terdidik, serta sering menganggap pengaruh pengangguran bersifat sama di semua wilayah. Dalam hal inflasi, penelitian seperti Tambunan & Rahayu (2021) menunjukkan pengaruh negatif, tetapi ada juga yang menyatakan inflasi rendah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belum banyak yang meneliti ketiga variabel ini secara bersamaan dalam satu model, apalagi dengan mempertimbangkan situasi khusus seperti pandemi COVID-19. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi terbaru di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas maka rumusan masalah dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas maka tujuan penelitian dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan yang terkait dengan pengaruh IPM, TPT, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang berhubungan dengan pengaruh IPM, TPT, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek-aspek IPM, TPT, dan inflasi.
2. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya IPM, TPT, dan inflasi.